

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Kajian Ilmu Tentang Pelacuran

##### 1. Pengertian Pelacuran

Pelacuran berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan dan pergendakan. Perkins dan Bennet dalam Koentjoro, mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.<sup>5</sup> Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.<sup>6</sup> Selain definisi di atas, dengan rumusan kalimat yang berbeda, Kartini Kartono menjabarkan definisi dari pelacuran adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Pelaku pelacuran disebut dengan *prostitute* atau yang lebih kita kenal dengan pelacur atau sundal. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih

---

<sup>5</sup> Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 30

<sup>6</sup> Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 216.

<sup>7</sup> Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 216.

dikenal dengan sebutan gigolo. Koentjoro mendefinisikan wanita tuna susila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adap dan sopan santun dalam berhubungan seks. Sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual.<sup>8</sup> Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Lindinalva Laurindo da Silva, menyatakan pengertian gigolo merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwa untuk bayaran mereka akan melakukan hubungan seks atau menghabiskan waktu mereka baik dengan wanita ataupun pria. Dalam pengertian ini, gigolo tidak hanya akan melayani seorang dari lawan jenis tapi juga mampu melayani orang dari sesama jenis. Dari pengertian pelacuran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan sebuah usaha memperjual-belikan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi, sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada pelacur laki-laki atau yang lebih dikenal dengan sebutan *gigolo*.<sup>9</sup>

## 2. Ciri-ciri Pelacuran

Kartini Kartono, menyatakan ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a) Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria, lonte laki-laki).
- b) Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya. Bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c) Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17-25 tahun. Pelacuran kelas rendah dan menengah acap kali memperkerjakan gadis-gadis pra-puber berusia 11-15 tahun, yang ditawarkan sebagai barang baru.

---

<sup>8</sup> Koentjoro, *op.cit.* hal.27

<sup>9</sup> Lindinalva Laurindo da Silva (1999: 41). <https://Ciri-Ciri Pelacuran> . Akses 21 Maret 2019.

<sup>10</sup> Kartini Kartono, *op.cit.* hal.239

- d) Pakaian sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh/eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu : wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang.
- e) Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir secara psikis (*afwezig, absent minded*), tanpa emosi atau afeksi, tidak pernah bisa mencapai orgasme sangat provokatif dalam ber-coitus, dan biasanya dilakukan secara kasar.
- f) Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat/kota lainnya.
- g) Pelacur-pelacur professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (*high class prostitutes*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lulusan akademi dan perguruan tinggi, yang beroperasi secara amatir atau secara professional.
- h) 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan (*feeble minded*). Selebihnya adalah mereka yang ada pada garis-batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelegensinya.

Pendapat selanjutnya adalah mengenai ciri gigolo yang disampaikan Lindinalva Laurindo da Silva. Dalam bukunya Lindinalva menjelaskan bahwa terdapat dua kategori gigolo, yang pertama yang disebut dengan *travestis* (waria), memiliki ciri bersifat feminim dan lebih menyatakan diri mereka sebagai homoseksual sehingga hanya memberikan layanan seks pada laki-laki lain. Kategori kedua adalah *garcons*, yang lebih sering menyebut diri mereka dengan istilah gigolo, memiliki ciri maskulin dan sering tidak mengetahui orientasi seks yang mereka miliki. Perbedaan dari kedua kategori gigolo ini juga dapat dilihat dari tempat mereka melakukan pekerjaan seks, cara mereka melakukan hubungan seks, klien mereka dancara pembayaran untuk pelayanan seks berada. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri gigolo ada dua macam,

pertama adalah gigolo dengan sifat feminim yang dikenal dengan sebutan *travestis* atau waria dan gigolo yang bersifat maskuli yang sering disebut dengan *garcons*.<sup>11</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Pelacuran

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Weisberg dalam Koentjoro, menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu<sup>12</sup> :

- a) Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik Oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b) Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c) Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua.

Dan adapun Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a) Faktor endogen : Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah. dan
- b) Faktor Eksogen : Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatic sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur

---

<sup>11</sup> Lindinalva Laurindo da Silva, *Loc.cit.* [https://Faktor-Faktor\\_Penyebab\\_Pelacuran](https://Faktor-Faktor_Penyebab_Pelacuran). Akses 21 Maret 2019.

<sup>12</sup> Koentjoro, *op.cit.* hal.53-54

<sup>13</sup> Npm Caswanto, 2017, dalam skripsi, "Tindak Pidana Prostitusi Sebagai Mata Pencarian".



karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Berbeda dengan pendapat di atas, Greenwald Koentjoro, mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Sedangkan Supratiknya berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Kemudian secara rinci Kartini Kartono, menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a) Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- d) Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *op.cit.* hal.245

keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita *mondain* lainnya.

- e) Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan banditbandit seks.
- f) Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
- g) Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
- h) Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
- i) Bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- j) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambargambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- k) Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
- l) Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.

- m) Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.
- n) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
- o) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
- p) Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
- q) Pekerjaan sebagai Pelacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacantikan, kemudahan dan keberanian.
- r) Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
- s) Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
- t) Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- u) Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban

kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

#### 4. Jenis-jenis Pelacuran

Coleman, Butcher dan Carson dalam Supratiknya, menyatakan ada empat macam pelacuran yaitu sebagai berikut<sup>15</sup> :

- a) Hubungan heteroseksual di mana pihak perempuan menerima pembayaran.
- b) Hubungan heteroseksual di mana pihak lelaki menerima pembayaran.
- c) Pelacuran homoseksual di mana seorang lelaki menawarkan layanan hubungan homoseksual pada lelaki lain.
- d) Pelacuran homoseksual di mana seorang perempuan menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada perempuan lain.

Berbeda dengan pendapat di atas, Kartini Kartono, membagi jenis-jenis prostitusi menjadi empat macam, yaitu<sup>16</sup> :

- a) Prostitusi menurut aktivitasnya :
  - 1) Prostitusi yang terdaftar yaitu Prostitusi yang pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan.
  - 2) Prostitusi yang tidak terdaftar yaitu Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun kelompok.
- b) Pelacuran menurut jumlahnya :
  - 1) Prostitue yang beroperasi secara individual merupakan *single operator*.
  - 2) Prostitue yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi.
- c) Pelacuran berdasarkan tempat penggolongan atau lokasinya :
  - 1) Segreasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya.

<sup>15</sup> Supratiknya, *Loc.cit.* [https://Jenis-Jenis\\_Pelacuran](https://Jenis-Jenis_Pelacuran) . Akses 21 Maret 2019.

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *op.cit.* hal.251



- 2) Rumah-rumah panggilan (*call houses*, tempat rendezvous, parlour)
- Selanjutnya Morse et al, menyatakan bahwa gigolo memiliki beberapa jenis, yaitu pekerja seks yang bekerja di jalan atau disebut sebagai *street hustler*, yang bekerja di bar atau sering disebut sebagai *bar hustler or dancer*, yang bekerja secara individual diserbut sebagai *kept boy* dan juga yang bekerja sebagai pemberi layanan pengantar disebut sebagai *call boy*.<sup>17</sup>

Dari pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pelacuran dapat digolongkan dalam jenis hubungan yang diberikan yakni heteroseksual dan homoseksual, kelegalan pelaksanaan praktik pelacuran yaitu pelacuran terdaftar dan tidak terdaftar, pelacuran menurut jumlahnya yaitu pelacur individual dan terorganisasi, serta pelacuran berdasarkan lokasinya yaitu pelacuran lokalisasi dan rumah-rumah panggilan. Sedangkan untuk jenis gigolo dapat dilihat dari tempat mereka mencari klien.

### 5. Akibat-akibat Pelacuran

Kartini Kartono, berpendapat mengenai akibat-akibat dari pelacuran sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a) Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit.
- b) Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.
- c) Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolensensi.
- d) Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin dan lain-lain).
- e) Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama.
- f) Adanya pengeksploitasian manusia satu oleh manusia lainnya.
- g) Bisa menyebabkan disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, satiriasi, dan lain-lain.

---

<sup>17</sup> Morse et al. (1999: 84). <https://akibat-akibat Pelacuran> . Akses 21 Maret 2019.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *op.cit.* hal.249

Dengan kalimat yang sedikit berbeda Kumar Koentjoro, menjelaskan bahwa persoalan yang memojokkan pelacur adalah bahwa pelacur seringkali dianggap membahayakan kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Pelacur acapkali disalahkan karena dianggap sebagai biang keretakan keluarga.<sup>19</sup> Pelacur juga dimusuhi kaum agamawan dan dokter karena peran mereka dalam menurunkan derajat moral dan fisik kaum pria serta menjadi bibit perpecahan anak-anak dari keluarganya Parker dalam Koentjoro.<sup>20</sup> Selanjutnya adalah pendapat mengenai dampak yang akan terjadi pada pelaku pelacuran pria (gigolo). Simon et al, menyatakan bahwa gigolo yang memiliki orientasi seks sebagai homoseksual lebih banyak terjangkit HIV AIDS dibandingkan dengan mereka yang heteroseksual dan biseksual. Pernyataan selanjutnya adalah ditemukannya penggunaan bermacam-macam obat kimia sehubungan dengan masalah kejiwaan sebagai akibat dari perasaan mengenai homoseksualitas yang mereka miliki dan identifikasi orientasi seks yang mereka miliki. Hal ini kemudian berpengaruh pada perasaan *obsessive-compulsivity*, pribadi yang sensitive (*inferiority* dan *personal inadequacy*), depresi dan kecemasan (*anxiety*).<sup>21</sup> Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pelacuran hanya akan membawa dampak negatif bagi pelaku pelacuran, pengguna jasa pelacuran dan juga kepada masyarakat.

## B. Kajian Umum Tentang Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu hal perilaku yang dilarang dan bertentangan dengan faedah-faedah hukum yang berlaku (hukum tertulis) dan merusak suasana yang ada di lingkungan masyarakat sehingga perbuatan tersebut menjadi jelek di mata masyarakat. Dan pada Prostitusi ini juga termasuk kejahatan kesusilaan atau

---

<sup>19</sup> Koentjoro, *op.cit.* hal.41.

<sup>20</sup> *Ibid.* hal, 42

<sup>21</sup> Simon et al. (1999: 88-92). [https://akibat-akibat\\_Pelacuran\\_](https://akibat-akibat_Pelacuran_) . Akses 21 Maret 2019.

menyangkut moral dimana dimata masyarakat Indonesia dianggap secara melawan hukum.

Adapun pengertian kejahatan menurut beberapa para ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut **Sutherland**, **Pengertian Kejahatan** adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana.
- b) **Pengertian Kejahatan** dari sudut pandang **hukum** adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.
- c) **Pengertian Kejahatan** menurut **R. Soesilo** dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :
  - 1) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
  - 2) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- d) Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama **Cicero** mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat



adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

- e) Menurut **Howard Becker**, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan dari orang lain, apabila dilingkungan sekitarnya orang tersebut dianggap sebagai penjahat, maka dengan sendirinya cap tersebut melekat pada dirinya, sehingga ia melakukan kejahatan karena cap yang menempel kepadanya. Contoh : Seorang wanita ditempat prostitusi akibat cap yang diberikan kepadanya, padahal wanita tersebut pada dasarnya wanita yang baik namun karena cap yang diberikan padanya dan dorongan dari temannya sehingga ia terjerumus dalam dunia prostitusi.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan

Berikut 4 jenis tipe kejahatan (kriminalitas) yakni:

- a). Kejahatan tanpa korban (crime without victims) adalah sebuah tindakan atau perilaku yang dilarang oleh hukum, namun yang tidak langsung merugikan atau melanggar hak-hak setiap orang tertentu, meskipun beberapa orang mungkin mengklaim itu merugikan masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini biasanya berlaku untuk orang dewasa.
- b). Kejahatan terorganisasi (organized crime) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang / kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisasi mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.
- c). Kejahatan kerah putih (white collar crime) adalah Suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat

---

<sup>22</sup> Utsman ali, *pengertian pakar*, <https://pengertian.kejahatan.dan.pembahasannya> . Akses 12 Januari 2019.



mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Kejahatan kerah putih adalah berbohong, curang, dan mencuri. Kejahatan kerah putih biasa dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi penting dalam jabatannya. Kejahatan ini sangat berbahaya sekali karena menyangkut kelangsungan kehidupan orang banyak, misalnya korupsi.

- d). Kejahatan korporasi (corporate crime) adalah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (rechtspersoon) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah.<sup>23</sup>

### **3. Cara Tindak Kejahatan**

Kejahatan merupakan tindakan yang sangat tercela dan buruk di mata masyarakat yang sangat meresahkan dan mengganggu kestabilan yang ada di lingkungan masyarakat. Serta Beragam-ragam pula tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat di luar sana untuk mencapai niat dan perbuatan tersebut. Berikut ini ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini yaitu<sup>24</sup> :

- a) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
- b) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- c) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- d) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Tatangsma.com, sebutkan 4 jenis tipe kejahatan (kriminalitas), <https://jenis-jenis-kejahatan> . Akses 12 Januari 2019.

<sup>24</sup> Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19.

- e) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- f) Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
- g) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
- h) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan Pekerja Seks Komersial. inilah Beberapa teori penyebab timbulnya suatu tindak kejahatan yakni<sup>25</sup> :

a). Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### b). Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>27</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah

---

<sup>27</sup> Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48.

satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>28</sup> Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbulah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>29</sup> Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c). Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan

---

<sup>28</sup> Anang Priyanto, 2012, *Op.cit.* hlm 77.

<sup>29</sup> Indah Sri Utami, 2012, *Op.cit.* hlm 72-73.



kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.<sup>30</sup>

d). Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>31</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>32</sup> Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi“, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122.

<sup>32</sup> Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.

negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

### C. Pencegahan Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi

#### 1. Pengertian Penanggulangan tindak pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana dengan bentuk tercapainya kesejahteraan yang ada di dalam masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan berarti semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematika dogmatik. Adapun Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat<sup>33</sup>. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljarto, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

---

<sup>33</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62.

larangan tersebut.”<sup>34</sup> Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>35</sup> Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54.

<sup>35</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm130.

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.



## 2. Tinjauan umum Tindak Pidana Pelacuran

Berkaitan dengan adanya pelacuran ini, di dalam KUHP terdapat dua pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi<sup>36</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Dan Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi<sup>37</sup>:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b) Anak yang menjadi korban pornografi;

---

<sup>36</sup> Gerry Muhamad Fizki, *KUHP dan KUHPA*, Permata Press, Jakarta. 2008. Hlm. 103.

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 168.

- c) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- d) Anak korban kejahatan seksual;
- e) Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2).

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan di dalam Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila Atau kegiatan Yang Sejenisnya Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, terdapat di dalam Pasal 2 dan 3 yang

mengatur Pencegahan Perbuatan Tuna Susila Atau Yang Sejenisnya, pada pasal 2 berbunyi <sup>38</sup>:

“ Kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan Dilarang melakukan perbuatan Tuna Susila dalam Daerah.”

Dan Pada Pasal 3, berbunyi <sup>39</sup>:

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Menyediakan tempat kegiatan Perbuatan Tuna Susila didalam Daerah .
- b. Menjadi Tuna Susila didalam Daerah.
- c. Mendatangkan Tuna Susila dari Luar Daerah.
- d. Melindungi atau menjadi pelindung Perbuatan Tuna Susila di Daerah.

Dan Ketentuan pidananya ada dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut<sup>40</sup> :

- (1) Barang Siapa Melanggar Ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan kepada Kas Daerah.

### **3. Penanggulangan Prostitusi**

Prostitusi sebagai masalah social yang sejak sejarah kehidupan manusia sampai dengan sekarang ini, dan selalu ada pada ssetiap tingkatan peradaban manusia, dimana pada Prostitusi ini perlu ditanggulangi dengan penuh kesungguhan dan berusaha. Usaha ini sangat sulit dimana melalui proses dan waktu yang sangat panjang, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: usaha yang bersifat *peventif* dan tindakan yang bersifat *represif* serta *kuratif*. Usaha

---

<sup>38</sup> Perda kabupaten Muara Enim no.3 tahun 2005 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila Atau kegiatan Yang Sejenisnya Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

<sup>39</sup> *Ibid.* pasal 3.

<sup>40</sup> *Ibid.* pasal 4 ayat (1) dan (2).



bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang berupa usaha *preventif* antara lain<sup>41</sup> :

- a) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;
- b) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
- c) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak remaja untuk menyalurkan kelebihannya;
- d) memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
- e) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
- f) Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa instansi terkait dan sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran prostitusi;
- g) Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
- h) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Penanggulangan prostitusi secara preventif ini harus dilakukan oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintahan maupun masyarakat setempat sehingga dapat berjalan maksimal. Seperti halnya Kepala Daerah, DPRD, Satpol PP dan Dinas Sosial serta pihak Kepolisian perlu bekerjasama dengan masyarakat secara bersama-sama melakukan tindakan seperti yang telah dijelaskan di atas untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi di wilayah mereka. Usaha *represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para wanita PSK untuk kemudian membawa mereka ke

---

<sup>41</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Bandung, PT RajaGrafindo Persada, 1981, hlm. 267.

kehidupan yang benar atau jalan yang benar. Usaha *represif* dan *kuratif* ini antara lain berupa sebagai berikut<sup>42</sup> :

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para PSK serta lingkungannya;
- b. Untuk mengurangi prostitusi, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang normal pada umumnya. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
- c. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para PSK yang terkena razia; disertai pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing orang;
- d. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya;
- e. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi PSK dan mau memulai hidup yang benar atau yang baru;
- f. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat asal mereka agar mereka mau menerima kembali mantan-mantan PSK itu untuk mengawali hidup baru yang benar;
- g. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi para PSK untuk membawa mereka kembali ke kehidupan yang benar;
- h. Mengikutsertakan mantan PSK dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Penanggulangan prostitusi secara represif dan kuratif ini dilakukan oleh dinas sosial sebagai akibat dimana telah terjadinya prostitusi di wilayah tertentu dan ditindakinya pelaku prostitusi secara hukum. Hal tersebut dilakukan agar pelaku

---

<sup>42</sup> Kartini Kartono, *op.cit.* hal.268

prostitusi tidak kembali melakukan praktek prostitusi sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya kehidupan yang layak.

#### A. Konsep Tentang Pekerja Seks Komersial

membahas pengetahuan Pekerja Seks Komersial dalam menanggulangi penyakit yang ada di lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat PSK diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Pekerja Seks Komersial itu juga bisa diartikan sebagai salah satu tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacuran itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan malapetaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pekerja Seks Komersial merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Dapat dilihat melalui tingkah laku, lepas bebas tanpa kendali, hal ini karena, adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum. Hal ini dikarenakan perkembangan Pekerja Seks Komersial sudah menjadi budaya serta tradisi pada berbagai negara sekarang ini, serta teknologi, industri dan kebudayaan manusia, serta turut berkembang pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Sejak zaman dahulu para pelacur selalu dikecam atau dikutuk oleh masyarakat, karena tingkahlakunya yang tidak susila dan dianggap mengotori sakralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang-orang yang melanggar norma-norma, adat dan agama dan menyebabkan penyebaran penyakit kelamin. Adapun hal yang mendasari Pekerja Seks Komersial terjun ke dunia pelacuran karena berbagai alasan, salah satunya faktor ekonomi dan masalah pribadi. Menyatakan Di samping itu, keterbatasan lapangan pekerjaan bagi perempuan juga menghentikan mereka sebagai salah satu pilar penyongsong ekonomi keluarga. Salah satu pilihan pekerjaan mudah bagi perempuan dengan keterampilan dan pendidikan rendah tetapi dengan harapan mendapat kehidupan yang layak adalah dengan menjalani

profesi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK). Kondisi mental/moral seseorang dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut yang bertentangan dengan akhlak, moral, dan agama, menjadi faktor banyaknya para wanita menjadi seorang Pekerja Seks Komersial. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep Spradley mengenai kebudayaan. Spradley, mendefinisikan kebudayaan sebagai sebuah sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar, yang mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia sekeliling mereka dan sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi dunia sekeliling mereka. Pengertian yang senada dengan Spradley juga telah dikemukakan oleh Goodenough yang mengatakan bahwa budaya suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku sesuai dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Budaya bukanlah suatu fenomena material, budaya tidak terdiri atas benda-benda, manusia, perilaku, atau emosi. Budaya adalah suatu hal ihwal yang dipunyai manusia dalam pikiran (mind), model yang mereka punya untuk mempersepsikan, menghubungkan, dan seterusnya. Penelitian ini mempergunakan pendekatan antropologi kognitif, kebudayaan dianggap sebagai seperangkat pengetahuan yang diperoleh manusia yang dipergunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan tingkah laku. Manusia memperoleh pengetahuannya melalui proses belajar, dengan cara mengamati alam sekitarnya atau melalui komunikasi dengan sesamanya. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh manusia tidak dapat diamati secara langsung. Spradley menjelaskan bahwa budaya berada dalam pikiran manusia yang didapatkan dengan proses belajar dan menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Proses belajar tersebut menghasilkan pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari pengalaman-pengalaman individu atau masyarakat.<sup>43</sup> Straus dan Quinn mengatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki individu diperolehnya melalui proses belajar yang bersifat informal atau melalui pengamatan (penerimaan rangsangan) sehari-hari dan bukan dari intruksi formal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari - Juni 2016

<sup>44</sup> Strauss dan Quinn dalam Ezra M. Choesin 2002:3.